

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha*, Vol. 35, (Denpasar: Pusat Badan Statistik Provinsi Bali, 2024).
- Dominikus Rato, Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Dalam *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2020).
- H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Haedar Akib, *Kebijakan Pemerintah Mengenai Pariwisata*, dalam Pengantar Pariwisata, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).
- I Gde Parimartha, *Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pekraman : Suatu Tinjauan Historis, Kritis*, dalam *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2020).
- I Gusti Gde, *Monografi Pulau Bali*, (Jakarta: Pusat Pertanian Rakyat, 1954).
- I Ketut Jaman, *Disharmonisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berbasis Desa Adat*, (Purbalingga: Eureka, 2024).
- I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal: Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*, (Denpasar: UNHI Press, 2021).
- I Wayan Arka, *Desa Adat sebagai Subyek Hukum Perjanjian*, (Denpasar: Udayana University Press, 2016).
- I Wayan Pastika, *Branding Kabupaten Gianyar : Representasi Identitas Kabupaten Seni dan Kabupaten Pusaka di Tengah Komunikasi Lokal, Nasional dan Internasional*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015).
- Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, (Panogoro : Uwais Insiprasi Indonesia, 2018).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: CV. Alumni, 1999), hal. 148
- Johannes Gunawan & Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2021).
- John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Radja Grafindo Persana, 2004).
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2006).
- _____, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

- Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar : Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024).
- Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu Sanusi, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).
- Ni Made Ruastiti, *Pengetahuan Pariwisata Bali*, (Mimika Baru: Penerbit Seni, 2019).
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993).
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Sigit Sapto Nugroho, Ahadiati Rohmatiah dan Mutmainah, *Desain Politik Hukum Pariwisata Indonesia Berbasis Kesejahteraan*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, (Jakarta: PT Intermasa, 2001).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70i2)
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029
- Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Mekanisme Kerjasama Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar.

Hasil Penelitian

- Daniel Markovits, “Contract and Collaboration”, *The Yale Law Journal*, Vol. 113 : 1417, 2004, <https://www.yalelawjournal.org/article/contract-and-collaboration>
- I Kadek Yudhi Pramadita, “Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pariwisata Tanah Lot Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- I Nyoman Punduh, “Perjanjian Sebagai Dasar Pengelolaan Obyek Wisata oleh Desa Adat di Kabupaten Gianyar”, *Kerta Dyatmika*, Vol. 17 No. 1 Februari 2020.
- Laurentius Ni, “Hak Prioritas Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan”, Disertasi, Malang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019.
- Lily Harjati Soedewo, “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris, Pengesahan (Legalisasi) serta Pendaftaran (*Waarmeking*) Akta di Bawah Tangan”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Pande Ketut Natalia Desintha, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terkait Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Pura Tirta Empul, Tampaksiring Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Manukaya Let”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022.
- Zulfikar Muhamad Rafif, “The Legal Consequences of A Cooperation Agreement Due to Merger”, *Law Review*, Vol. XXII, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.5360>.

Website

- Hubungan Masyarakat Kabupaten Gianyar, “Karya Padudusan Agung di Pura Tirta Empul Tampaksiring”. <https://gianyarkab.go.id/informasi-publik/berita/karya-padudusan-agung-di-pura-tirta-empul-tampaksiring>. Diakses pada 5 Desember 2024.
- Nusa Bali, “Candi Tebing Tegallinglah Resmi Jadi Daya Tarik Wisata”, <https://www.nusabali.com/berita/60251/candi-tebing-tegallinglah-resmi-jadi-daya-tarik-wisata>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025
- Nusa Bali, “Goa Garba – Pura Mengening Dikelola Langsung Pemkab”, <https://www.nusabali.com/berita/84159/goa-garba-pura-mengening-dikelola-langsung-pemkab>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025

Kamus

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Black Law Dictionary Daring, <https://thelawdictionary.org/>
- Cambridge University, Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Prof. I Wayan Windia, pengajar Hukum Adat Bali, *Zoom*, Jakarta, Tanggal 20 Mei 2025, Pukul 18.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Anak Agung Istri Kesumawati, Pejabat Fungsional Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, *Whatsapp Call*, Jakarta, Tanggal 26 Mei 2025, Pukul 12.33 WIB

Hasil wawancara dengan I Wayan Lanus, *bendesa pengempon* DTW Gunung Kawi Sebatu, *Whatsapp Call*, Jakarta, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 10.01 WIB

Hasil wawancara dengan I Ngurah Susatya Putra, *bendesa pengempon* DTW Goa Gajah dan Yeh Pulu, *Whatsapp Call*, Jakarta, Tanggal 26 Mei 2025, Pukul 09.27 WIB

Hasil wawancara dengan I Ketut Nuarka, *bendesa pengempon* DTW Gunung Kawi Tampaksiring, *Whatsapp Call*, Jakarta, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 19.49 WIB

Hasil wawancara dengan I Dewa Gede Raka, *bendesa pengempon* DTW Goa Garba, *Whatsapp Video Call*, Jakarta, Tanggal 18 Mei 2025, Pukul 16.14 WIB

Hasil wawancara dengan I Wayan Mudita, *bendesa pengempon* DTW Pura Mengening, *Whatsapp Call*, Jakarta, Tanggal 18 Mei 2025, Pukul 11.25 WIB

Hasil wawancara dengan I Ketut Patra Asmara, *bendesa pengempon* DTW Candi Tebing Tegallinggah, *Whatsapp Call*, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 12.36 WIB

